

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Memperhatikan data dan analisa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana upaya Indonesia meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui *Indonesian Agency for International Development* (Indo AID)?” Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau *Indonesian Agency for International Development* (Indo AID) sebuah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk pada tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia berdasarkan PP No. 57 Tahun 2019. Secara umum, pekerjaan lembaga ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mengelola dana investasi dan memberikan hibah kepada pemerintah / lembaga asing. Peluncuran Indo AID didorong oleh kesadaran bahwa Indonesia perlu membangun hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik

Selatan. Hal ini dikarenakan negara-negara Pasifik Selatan merupakan target utama kelompok-kelompok separatis Papua dalam menggalang dukungan internasional dan menjadi penyambung lidah yang efektif bagi mereka dalam forum-forum internasional. Negara-negara Pasifik Selatan dapat dengan mudah memberikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok OPM sebab kuatnya rasa solidaritas etnis Melanesia di kawasan tersebut.

2. Pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui Indo AID dapat dilatarbelakangi oleh beberapa motif, diantaranya adalah:

- Motif Kemanusiaan (*Humanitarian Motives*)

Motif kemanusiaan dari pemberian bantuan Indo AID di Pasifik Selatan pada tahun 2020-2022 didorong akibat terjadinya bencana alam di Fiji dan Kepulauan Solomon, serta dampak yang diberikan oleh pandemi Covid-19 di Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut dapat menunjukkan rasa simpati / kepedulian Indonesia terhadap permasalahan yang ada di Pasifik Selatan.

- Motif Ekonomi (*Economic Motives*)

Motif ekonomi dari pemberian bantuan Indo AID di Pasifik Selatan adalah untuk meningkatkan kerja sama dagang yang positif dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan juga untuk membuka pintu ekspor dan investasi bagi perusahaan/produk Indonesia di Pasifik Selatan. Motif ekonomi ini telah tercapai ditandai dengan terjadinya peningkatan signifikan nilai ekspor

Indonesia di Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini pasca implementasi Indo AID. Dengan adanya peningkatan hubungan dagang yang baik antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, maka Indonesia dapat lebih meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

- Motif Identitas (*Identity Motives*).

Terkait pemberian bantuan Indo AID di kawasan Pasifik Selatan, motif ini merupakan motif terpenting bagi Indonesia sebab pemberian bantuan yang diberikan Indonesia merupakan sebuah langkah untuk menegaskan identitas Indonesia sebagai bagian dari keluarga Melanesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki otoritas dan kedaulatan penuh atas Papua Barat, dan bukan OPM.

3. Pemberian bantuan luar negeri yang disalurkan oleh Indo AID telah berhasil menciptakan keharmonisan hubungan antara Indonesia dengan Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini di Pasifik Selatan. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan hubungan dagang yang signifikan serta respon baik yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Pasifik Selatan terhadap pemberian bantuan Indonesia. Namun sekalipun demikian, pendekatan *soft power* Indonesia melalui pemberian bantuan luar negeri oleh Indo AID nyatanya belum efektif untuk meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan OPM. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Vanuatu yang masih vokal dan aktif dalam menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua

dalam forum-forum internasional hingga tahun 2021. Selain Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, bahkan Fiji masih memberikan sinyal dukungan kepada gerakan kemerdekaan Papua Barat sekalipun tidak secara formal melainkan melalui perantara organisasi internasional. Pada tanggal 25 Juli 2022, Kaledonia Baru bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan ULMWP. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Presiden Kongres ULMWP dan Pemerintahan Sementara Kaledonia Baru dalam sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut terlibat dalam proses dekolonisasi dan emansipasi.

4. Disamping belum mampunya Indo AID dalam meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap OPM, prospek Indo AID di kawasan Pasifik Selatan dalam mengubah citra Indonesia dan meredam dukungan terhadap gerakan separatis Papua Barat di kawasan tersebut tergolong baik. Hal ini tidak lain disebabkan karena pendanaan Indo AID yang telah *passed out* secara total dalam penggunaan Rupiah Murni pada tahun 2022. Selain itu, akan selalu ada kesempatan bagi Indo AID untuk memberikan bantuan hibah di terhadap negara-negara Pasifik Selatan sesuai dengan ketiga motif yang telah dijelaskan sebelumnya (kemanusiaan, ekonomi dan identitas).

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menemukan beberapa saran. Saran ini dimaksudkan sebagai gambaran alternatif kebijakan yang efektif bagi Indonesia khususnya Lembaga Dana Pembangunan Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) / *Indonesian Aid* (Indo AID) dalam mengelola bantuan luar negeri di Pasifik Selatan sehingga dapat meningkatkan citra positif Indonesia dan meredam dukungan Pasifik Selatan terhadap gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun saran-saran tersebut, diantaranya:

Pertama, terkait pemberian dana bantuan oleh, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan anggaran investasi untuk dikelola oleh Indo AID. Meskipun Indonesia dicetuskan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) *World Giving Index* pada tahun 2021, namun jumlah pemberian bantuan yang diberikan oleh Indo AID masih tergolong kecil. Diketahui bahwa jumlah hibah Pemerintah Indonesia ke negara dan lembaga asing selama tahun 2020 adalah sebesar 33,01 miliar rupiah atau senilai 0,001% dari *Gross National Income* (GNI) Indonesia.

Perlu diingat kembali, Pasifik Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling banyak mendapat bantuan luar negeri di dunia. Dengan kata lain, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara Pasifik Selatan. Terdapat banyak negara-negara lain yang menjadi donatur dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan *effort* lebih untuk menarik

hati dari negara-negara di kawasan tersebut untuk mencapai kepentingannya dengan lebih optimal.

Kedua, peneliti menemukan bahwa ternyata pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menggunakan *soft power* nyatanya masih belum cukup ampuh untuk meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan OPM. Oleh sebab itu, intensitas dialog langsung kepada negara-negara Pasifik Selatan juga perlu ditingkatkan dalam upaya meredam dukungan kawasan tersebut terhadap gerakan kemerdekaan Papua, misalnya melalui kunjungan kenegaraan di negara-negara Pasifik Selatan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia juga perlu menyusun *Grand Strategy* yang jelas terkait kebijakan luar negeri Indonesia di Pasifik Selatan. Sehingga bukan hanya sekadar pemberian bantuan luar negeri yang bersifat responsif seperti pemberian bantuan bencana alam, penanganan Covid-19 dan juga *capacity building*, tetapi dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan utama negara-negara di Pasifik Selatan, seperti masalah ancaman perubahan iklim, HAM dan dekolonialisasi sehingga pemberian bantuan yang diberikan oleh Indo AID dapat lebih memberi arti bagi negara-negara penerima di Pasifik Selatan.